

# **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)**

**Boby Fandhi Putra**  
**Dwi Atmanto**  
**Nila Firdausi Nuzula**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email : [bobyfandhi@gmail.com](mailto:bobyfandhi@gmail.com)

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi berbagai jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Kota Blitar dalam meningkatkan retribusi daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menyajikan fakta mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusi serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah.*

**Kata kunci:** *Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Pendapatan asli Daerah*

## ***Abstract***

*This research aims to examine how much the income and effectiveness of various types of retribution contribution to local revenues, as well as the efforts of local governments, especially in the city of Blitar in increasing local retribution through intensification and extension programs. Data collection is done through interviews, and documentation. The method that used in this study is descriptive research method with a case study approach to present the facts about effectiveness and contribution of various types of retribution to local revenues, as well as the efforts of local governments and increasing reception of local retribution through intensification and extension programs. The results of this research conducted shows that the level of effectiveness of retribution income by the types over the period 2008 – 2012, overall effective. However, the contribution of local retribution toward the local revenue during that period still not in maximal expectations, and the intensification and extension programs which is conducted by the government is not optimal yet. Main factors that make the problem are the lack of public awareness and compliance of retribution payers and the lack of local government performance in increasing the local retribution.*

**Key word :** *Effectiveness, Contribution, Local Retribution, Intensification, Extension and Local Revenue.*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kota Blitar merupakan salah satu Kota yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan

daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya Kota Blitar. Pemerintah daerah Kota Blitar memberikan wewenang kepada DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) untuk mengelola retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar).”**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar. Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar serta upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Blitar.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam

melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.” (Yani, 2008: 51-52)

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Halim (2004: 67) Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

### **Retribusi**

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi (Suandy, 2011: 3).

### **Objek Retribusi**

Menurut Kurniawan (2004: 145-146) Objek Retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

#### **a. Jasa Umum**

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Misalnya pelayanan kesehatan.

#### **b. Jasa Usaha**

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Misalnya penyediaan tempat penginapan dan usaha bengkel kendaraan.

#### **c. Perizinan Tertentu**

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum. Pengajuan izin oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang dapat dipungut retribusi adalah izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan tanah.

### **Retribusi Daerah**

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Halim, 2004:115). Hal yang sama diungkapkan oleh Basuki (2007:58) Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dipungut pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### **Jenis Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis retribusi terbagi dalam tiga golongan, antara lain:

#### **a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:**

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:**

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
  - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - 3) Retribusi Izin Gangguan;
  - 4) Retribusi Izin Trayek; dan
  - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas menurut Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil) dengan *output* (target).

### Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.

### Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah

#### 1. Intensifikasi

Menurut Halim (2004:109) Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

#### 2. Ekstensifikasi

Menurut Halim (2004:110) ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber

pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian skripsi ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar yang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar.

Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Efektivitas masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar.
2. Laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar.
3. Kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Blitar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Efektivitas retribusi daerah.

Rumus efektivitas retribusi daerah adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Nurlan (2006:49)

**Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah.**

Efektivitas retribusi daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Nurlan (2006:49)

2. Laju pertumbuhan retribusi daerah

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Halim (2004 : 163)

Keterangan:

$G_x$  = Laju pertumbuhan retribusi daerah

$X_t$  = Realisasi retribusi daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  = Realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya

Sumber : Halim (2004 : 163)

3. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Rumus menghitung kontribusi retribusi daerah adalah:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Halim (2004:163)

Keterangan:

$P_n$  = Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD

$QY$  = Realisasi PAD

$QX$  = Realisasi retribusi daerah

$N$  = Tahun (periode tertentu)

**Tabel 2. Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah.**

Persentase kontribusi retribusi daerah	Kriteria
$\geq 50$	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Sedang
20 – 30	Cukup
10 – 20	Kurang
$\leq 10$	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004:163)

4. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

- a. Intensifikasi

Usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

- b. Ekstensifikasi

Usaha untuk meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan dengan cara mencari, menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian data

Berikut tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 serta tabel target dan realisasi retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012 :

**Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Target PAD ( Rp )	Realisasi PAD ( Rp )	Efektivitas ( % )
2008	39.715.286.321	40.809.908.439	102,76%
2009	33.441.682.984	39.860.842.246	119,20%
2010	46.856.490.224	47.690.974.775	101,78%
2011	54.018.529.211	52.598.069.707	97,37%
2012	55.966.506.014	63.621.643.039	113,68%

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

**Tabel 4. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Blitar periode 2008-2012**

Tahun	Keterangan	Jenis Retribusi			Retribusi Daerah ( Rp )
		Retribusi Jasa Umum ( Rp )	Retribusi Jasa Usaha ( Rp )	Retribusi Perizinan Tertentu ( Rp )	
2008	Target	17.280.497.534	3.275.355.350	176.078.200	20.731.931.084
	Realisasi	17.271.416.026	3.089.637.151	202.707.037	20.563.760.214
2009	Target	17.960.779.505	3.654.498.800	200.295.200	21.815.573.505
	Realisasi	20.503.941.820	3.455.901.268	275.092.661	24.234.935.749
2010	Target	3.128.161.000	3.814.019.000	175.476.800	7.117.676.800
	Realisasi	3.019.313.690	3.334.142.880	296.397.225	6.649.853.795
2011	Target	3.002.070.700	3.840.502.413	189.327.650	7.031.900.763
	Realisasi	2.881.957.636	3.503.895.127	301.878.607	6.687.731.370
2012	Target	3.491.631.050	4.034.897.938	136.428.450	7.662.957.438
	Realisasi	3.190.200.444	3.412.770.377	296.428.281	6.899.399.102

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

### Analisis data dan Pembahasan

#### 1. Efektivitas tiap jenis Retribusi Daerah Kota Blitar periode 2008-2012 sebagai berikut :

- a) Efektivitas penerimaan retribusi jasa umum Kota Blitar periode tahun 2008-2012.

**Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kota Blitar Periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Jasa Umum ( Rp )	Realisasi Retribusi Jasa Umum ( Rp )	Efektivitas ( % )	Kriteria
2008	17.280.497.534	17.271.416.026	99,95	Efektif
2009	17.960.779.505	20.503.941.820	114,16	Sangat Efektif
2010	3.128.161.000	3.019.313.690	96,52	Efektif
2011	3.002.070.700	2.881.957.636	96,00	Efektif
2012	3.491.631.050	3.190.200.444	91,37	Efektif

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa persentase efektifitas penerimaan retribusi jasa umum tertinggi selama periode 2008-2012 diperoleh pada tahun 2009 sebesar 114,16%. Pada tahun 2012 persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa umum mengalami penurunan dan merupakan persentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,37%, akan tetapi persentase penerimaan retribusi tersebut masih dikatakan sebagai efektif.

- b) Efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha Kota Blitar periode tahun 2008-2012.

**Tabel 6. Efektivitas Retribusi Jasa Usaha Kota Blitar Periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2008	3.275.355.350	3.089.637.151	94,33	Efektif
2009	3.654.498.800	3.455.901.268	94,57	Efektif
2010	3.814.019.000	3.334.142.880	87,42	Cukup Efektif
2011	3.840.502.413	3.503.895.127	91,24	Efektif
2012	4.034.897.938	3.412.770.377	84,58	Cukup Efektif

Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.4 dapat dilihat bahwa persentase efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha selama periode 2008-2012 diperoleh pada tahun 2009 sebesar 94,57% dengan kriteria efektif dan persentase terendah diperoleh pada tahun 2012 84,58% dengan kriteria cukup efektif.

- c) Efektivitas penerimaan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode tahun 2008-2012.

**Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Blitar Periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2008	176.078.200	202.707.037	115,12	Sangat Efektif
2009	200.295.200	275.092.661	137,34	Sangat Efektif
2010	175.476.800	296.397.225	168,91	Sangat Efektif
2011	189.327.650	301.878.607	159,45	Sangat Efektif
2012	136.428.450	296.428.281	217,28	Sangat Efektif

Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat bahwa persentase penerimaan retribusi perizinan tertentu selama periode 2008-2012 sudah mencapai kriteria sangat efektif, dengan persentase tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar 217,28%.

## 2. Laju Pertumbuhan tiap jenis Retribusi Daerah Kota Blitar periode 2008-2012 sebagai berikut :

- a) Laju pertumbuhan retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012.

**Tabel 8. Laju Pertumbuhan Retribusi Jasa Umum Kota Blitar Periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2008	17.280.497.534	17.271.416.026	-	-
2009	17.960.779.505	20.503.941.820	3.232.525.794	18,72
2010	3.128.161.000	3.019.313.690	-17.484.628.130	-85,27
2011	3.002.070.700	2.881.957.636	-137.356.054	-4,55
2012	3.491.631.050	3.190.200.444	308.242.808	10,70

Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.6 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan retribusi jasa umum periode 2008-2012 mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan jenis retribusi pada retribusi jasa umum sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2012 persentase laju pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 10,7% dari tahun sebelumnya.

- b) Laju pertumbuhan retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012.

**Tabel 9. Laju Pertumbuhan Jasa Usaha Kota Blitar Periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2008	3.275.355.350	3.089.637.151	-	-
2009	3.654.498.800	3.455.901.268	366.264.117	11,85
2010	3.814.019.000	3.334.142.880	-121.758.388	-3,52
2011	3.840.502.413	3.503.895.127	169.752.247	5,09
2012	4.034.897.938	3.412.770.377	-91.124.750	-2,60

Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat laju pertumbuhan retribusi jasa usaha selama periode 2008-2012 mengalami fluktuasi, tetapi berbeda dengan retribusi jasa umum yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2010. Persentase laju pertumbuhan retribusi jasa usaha mengalami penurunan sebesar 3,52% pada tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,09% dan pada tahun 2012 persentase kembali mengalami penurunan sebesar 2,6%.

- c) Laju pertumbuhan retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012.

**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Blitar Periode 2008-2012**

Tahun	Target Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Laju Pertumbuhan %
2008	176.078.200	202.707.037	-	-
2009	200.295.200	275.092.661	72.385.624	35,71
2010	175.476.800	296.397.225	21.304.564	7,74
2011	189.327.650	301.878.607	5.481.382	1,85
2012	136.428.450	296.428.281	-5.450.326	-1,81

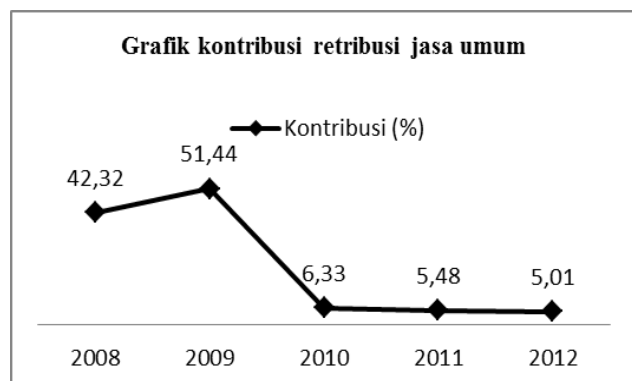
Sumber: DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan tabel IV.8 dapat dilihat persentase laju pertumbuhan retribusi perizinan tertentu selama periode 2008-2012 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 35,71%. Pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 7,74% dan 1,85% pada tahun 2011. Persentase laju

pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 1,81% pada tahun 2012.

### 3. Kontribusi tiap jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012.

a) Kontribusi retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012.

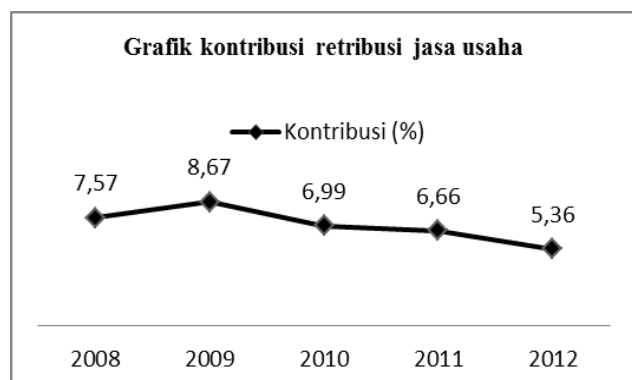


**Gambar 1. Grafik kontribusi retribusi jasa umum Kota Blitar periode 2008-2012.**

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan gambar IV.1 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 mengalami fluktuasi. Persentase kontribusi retribusi jasa umum tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 51,44%. Pada tahun 2010-2012 persentase kontribusi mengalami penurunan dan tingkat persentase kontribusi terendah pada tahun 2012 sebesar 5,01%.

b) Kontribusi retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012.



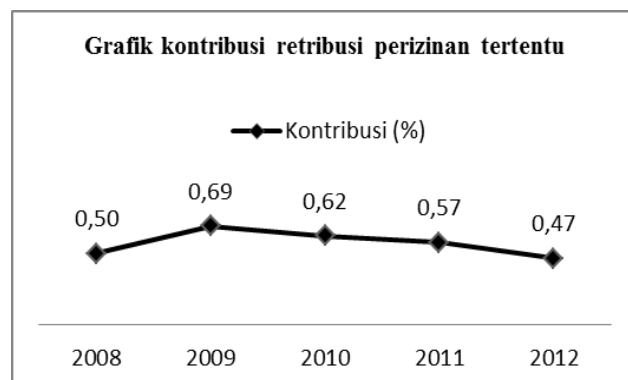
**Gambar 2. Grafik kontribusi retribusi jasa usaha Kota Blitar periode 2008-2012.**

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan gambar IV.2 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar

periode 2008-2012 juga mengalami fluktuasi. Sama halnya dengan kontribusi retribusi jasa umum, persentase kontribusi retribusi jasa usaha tertinggi diperoleh pada tahun 2009 sebesar 8,67%. Pada tahun 2010-2012 persentase kontribusi cenderung menurun dengan tingkat persentase kontribusi terendah pada tahun 2012 sebesar 5,31%.

c) Kontribusi retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012.



**Gambar 3. Grafik kontribusi retribusi perizinan tertentu Kota Blitar periode 2008-2012.**

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan gambar IV.3 tersebut dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar periode 2008-2012 sangat rendah. Persentase kontribusi yang rendah ini dikarenakan kurangnya penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah terkait retribusi perizinan tertentu.

### 4. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

- a) Intensifikasi merupakan usaha pemerintah dalam memperbesar jumlah penerimaan atau pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti guna meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Usaha yang dilakukan pemerintah Kota Blitar antara lain:
1. Melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah.
  2. Melakukan pendataan terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerah.
  3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi.



4. Meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah melalui pelatihan kerja.
- b) Ekstensifikasi merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan dengan cara mencari, menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, yaitu dengan melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Blitar serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru dengan dasar dan pedoman yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 97,77%. Pada tahun terakhir (2012) penerimaan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha mengalami penurunan persentase efektifitas, sedangkan pada retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan persentase efektifitas. Berdasarkan hasil analisis, persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 dapat dikatakan sudah efektif.
2. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang sangat kecil. Pada tahun terakhir (2012) retribusi jasa umum mengalami kenaikan persentase laju pertumbuhan sebesar 10,7% dan penurunan persentase laju pertumbuhan terjadi pada jenis retribusi jasa usaha sebesar 2,6% dan retribusi perizinan tertentu sebesar 1,81% pada tahun 2012.
3. Tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2010-2012. Selama periode tersebut, kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang dengan rata-rata sebesar 12,5%. Setelah adanya pengurangan jenis retribusi yang disesuaikan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, jenis retribusi jasa umum mengalami penurunan kontribusi yang cukup besar. Pada jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan juga kurang dapat

memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

4. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dengan cara melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi dan meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah melalui pelatihan kerja. Sedangkan ekstensifikasi ialah dengan melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Blitar serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru dengan dasar dan pedoman yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Saran**

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah agar mencapai tingkat sangat efektif sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin terhadap seluruh masyarakat sebagai wajib retribusi tentang retribusi daerah, bekerja sama dengan kantor-kantor dinas yang terkait jenis retribusi daerah, misalnya sosialisasi dan penyuluhan retribusi pasar yang bekerja sama dengan dinas pasar dan tidak hanya dilakukan pada area pasar, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat dilakukan di balai desa, di kantor kecamatan maupun berkunjung langsung ke rumah warga. Hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat tentang retribusi dapat bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat meningkat.
2. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar sebaiknya juga melakukan peningkatan promosi terhadap objek retribusi yang memiliki potensi dengan bekerja sama dengan kantor dinas lain maupun pihak swasta guna mendukung tercapainya realisasi penerimaan retribusi daerah yang optimal. Misalnya dengan melakukan promosi tentang retribusi izin mendirikan bangunan melalui media massa berupa brosur maupun



- reklame yang dicetak oleh pihak swasta. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal tentang retribusi daerah sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi meningkat.
3. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar diharapkan dapat bekerja sama dengan kantor-kantor dinas terkait untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah melalui intensifikasi yaitu memperbaiki sistem pemungutan melalui inovasi dan langkah-langkah baru misalnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib retribusi, melakukan penyederhanaan proses administrasi retribusi daerah dan melakukan evaluasi dan perubahan terhadap pengenaan tarif retribusi agar tidak memberatkan wajib retribusi serta, meningkatkan kompetensi dan kinerja serta melakukan penambahan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan teknis pemungutan retribusi daerah agar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat.
  4. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan usaha-usaha masyarakat khususnya usaha kecil menengah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah serta melakukan ekstensifikasi sumber-sumber yang berpotensi menjadi retribusi daerah sesuai dengan hasil pendataan perkembangan potensi daerah yang dimiliki serta berpedoman pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  5. Pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan hasil penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk APBD yang dipublikasikan melalui media massa misalnya melalui internet, surat kabar maupun televisi, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi.
- Kurniawan, panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang:Bayumedia.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi Offset.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung:PT. Indeks IKAPI.
- Suandy, Erly. 2011. *Perpajakan*. Edisi 5. Jakarta:Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakses 3 November 2013 dari <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/>
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diakses 3 November 2013 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/>
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi sektor publik*. Malang:UMM Press.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Kreasi Wacana.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.